

ABSTRAKSI

Tesis ini berjudul tanggung gugat pelaku usaha penerbangan niaga atas pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian penumpang selaku konsumen, dengan permasalahan apakah akibat hukum atas pelanggaran izin yang dilakukan oleh pelaku usaha penerbangan, dan bagaimana tanggung gugat pelaku usaha penerbangan atas jatuhnya pesawat yang menimbulkan kerugian bagi penumpang selaku konsumen. Penelitian hukum menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari pelanggaran izin terbang dapat mengancam keselamatan penumpang sesuai dengan Pasal 4 (a) UUPK yang memuat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan Pasal 53 Ayat 1 UU Penerbangan yang menyebutkan kegiatan yang membahayakan keselamatan udara tersebut antara lain terbang diluar jalur yang ditentukan, terbang tanpa membawa keselamatan dan terbang diatas kawasan terlarang. Lebih jauh pada Pasal 411 UU Penerbangan menjelaskan adanya sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan pesawat udara, penumpang dan barang.

Tanggung gugat pelaku usaha penerbangan Internasional memakai Konvensi Warsawa 1929 karena PM 77 Tahun 2011 berlaku untuk penerbangan domestic akan tetapi pelaku usaha penerbangan boleh menggunakan besaran ganti kerugian menurut PM 77 Tahun 2011. Selain itu pemberian ganti kerugian juga dapat dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Apabila penumpang tersebut berkewarganegaraan Indonesia maka dasar pemberian ganti rugi menggunakan PM 77 Tahun 2011 dengan nilai ganti kerugian kira-kira Rp.1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bagi penumpang yang berkewarganegaraan asing yang mana Negara asalnya telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 maka dapat menggunakan Konvensi Montreal 1999 sebagai dasar untuk mendapatkan ganti kerugian yakni kira-kira senilai Rp.1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Kata kunci :Tanggung Gugat, Pelaku Usaha, Penerbangan, Konsumen, Penumpang, Izin Terbang dan Ganti Rugi.

ABSTRACT

This thesis is entitled as The Liability of Commercial Aviation Businesses over the Violations of Law that can Harm the Passengers as Consumers. This thesis tackles the issues on the legal consequences for aviation businesses and their liability to their passengers as their consumers in case of crash or any accident. This research used Statute and Conceptual Approach.

The result of this research states that the legal consequences is based on the fly breach permit that can affect the safety of the passengers in accordance to article 4 (a) UUPK which includes the comfort authority safety, and security; and the first paragraph of the ACT on Article 53 which mentioned about flight activities that damage air safety such as flying far from forbidden area. Meanwhile, it was clearly specified on article 411 of the the aviation act that there are criminal sanctions for those who intentionally violates the flying standards and rules that could endanger the plane, the passengers, and the other belongings.

The responsibility of the internasional flights perpetrators is based on Warsaw Covention 1929 while the minister's Rules 77 of 2011 applies for all domestic flights. However, though there is no legal basis, the aviation company must abide and use the magnitude of damages based on the minister's rules 77 of 2011. Aside from that, the cost of damage and benefits that the passengers can get also depends on the passenger's nationality. If the nationality of the passengers is Indonesian, the cost of damage that must be awarded to him/her is Rp. 1.250.000.000 (one billion two hundred and fifty million rupiah) an it is based on PM 77 of 2011 while for the foreign passengers, the amount to be given to the depends on the law of their native country and must be based on the Montreal Convention 1999. According to the said convention, the estimated amount would be Rp. 1.700.000.000 (one billion seven hundred).

Keyword : The Liability, Businessmen, Aviation, Consumer, Flight approval and Indemnification.